

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Burhanuddin, Nizam, 2015, *Hukum Keuangan Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Devas, Nick dkk, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Direktorat Sistem Perbendaharaan, 2016, *Modul Tuntutan Ganti Rugi (Bendahara dan Pegawai Negeri non Bendahara) Edisi 2016*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Jakarta.
- Fahrojih, Ikhwan, 2016, *Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal dan Eksternal serta DPR*, Intrans Publishing, Malang.
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah; Kajian tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2011, *Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- J. Kardjo, 1994, *Tuntutan Ganti Rugi*, Eko Jaya CV, Jakarta.
- M. Hadjon, Philipus, Tatiek Sri Djatmiati, G.H. Addink & J.B.J.M Ten Berge, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta.
- Mamudji, Sri Soerjono Soekanto dan, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2016, *Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers*, Jakarta.

Saidi, M. Djafar dan Eka M. Djafar, 2017, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Suhendar, 2015, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Setara Press, Malang.

Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tjandra, W. Riawan, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Tuanakotta, Theodorus M., 2009, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3344).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4654).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5934).

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian

Negara terhadap Bendahara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 147).

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6010).

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011).

Lain-lain

BPK, 2012, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun 2011*, BPK, Mataram.

BPK, 2012, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2011*, BPK, Mataram.

BPK, 2015, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2014*, BPK, Jakarta.

BPK, 2016, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015*, BPK, Jakarta.

BPK, 2016, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015*, BPK, Jakarta.

BPK, 2016, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015*, BPK, Jakarta.

BPK, 2016, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2015*, BPK, Papua Barat.

BPK, 2017, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016*, BPK, Aceh.

BPK, 2017, *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lohseumawe Tahun 2016*, BPK, Aceh.

Eledon Simanjuntak, 2013, *Pemahaman Umum Tentang Kerugian Negara dan Permasalahan-Permasalahan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, disampaikan dalam Workshop Percepatan Implementasi Penyelesaian*

Kerugian Negara Terhadap Bendahara Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 untuk TPKD/Majelis Pertimbangan TP/TGR Entitas Pemantauan Perwakilan BPK Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Dan Sumatera Barat di Padang.

Gilang Prama Jasa, dan Ratna Herawati, 2017, *Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Audit Keuangan Negara*, Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Redaksi, 2017, *Potret Temuan Tindak Lanjut BPK*, Majalah Keuangan Negara No. 008 Vol III 2017

Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Wawancara

Wawancara dengan Agustinus Triyonojati S.H., M.Hum., C.L.A., Kepala Sub Bagian Hukum BPK RI Perwakilan DI Yogyakarta, pada tanggal 5 November 2018, di Yogyakarta.

Wawancara dengan Nur Miftahul Lail, S.E., Ak., C.A., Kepala Sub Auditorat DI Yogyakarta, BPK Perwakilan DI Yogyakarta, pada tanggal 5 November 2018, di Yogyakarta.